

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. P Perlindungan, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.
- Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Fiends of the Earth (FoE), Indonesia, 1999.
- Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
- Haryato Kunto, *Wajah Bandung Tempo Doeloe*, PT Gramedia, Jakarta, 2001.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria, perspektif hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Indrawati, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Fiends of the Earth (FoE), Indonesia, 1995.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara regulasi dan implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1986.
- Purwopranoto S, *Penuntun Tentang Hukum Tanah*, Astana ABEDE, Semarang, 1953.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.

- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sudargo Gautama, *Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*, Alumni, Bandung, 1973.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas tanah*, Kencana, Jakarta, 2009.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern.

C. Sumber Lain

Artikel Info Bandung, *Konflik dalam Perencanaan Kota (Tata ruang VS Tata Uang)*, www.aa-bandung.blogspot.com, diakses tanggal 8 Mei 2010, jam 21:30 WIB.

Artikel Gala media, *Berwisata di kota Bandung dan Belanja di Factory Outlet (FO)*, www.klik-galamedia.com, diakses tanggal 7 Mei 2010, jam 19:30 WIB.

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged© HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003 dalam www.thefreedictionary.com, diakses tanggal 7 Mei 2010, jam 19:30 WIB.